

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG USAHA EKONOMI (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)

Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: dwipratiwikurniawati@ymail.com

Abstract: Society Empowerment in Economic Sector. This research based on Society Empowerment Service Mojokerto City has highly influent to change thinking up at more progress. As for Society Empowerment Service Mojokerto's has sought to empowering poor society by providing assistance to low-income communities. Programs that have been implemented in the field of economic enterprises especially in the sub-field of economic and community development assistance, along with the impact of the empowerment program for the poor economic independence are expected to improve the welfare of the community. This research use description method with qualitative approach. The result of this research shows that programs have been implemented by Society Empowerment Service Mojokerto's especially on Economic Sector include individual assistance and association assistance. So, that was need a good work between the society and government. The program has increased the economical ability, especially in productivity and percapita income. The recommendation give from this research are Society Empowerment Service should work optimally and professionally as a coordinator and facilitator for the society to have a better life. They should pay a lot of attention in target, and do it constantly. Increase the interaction with society, giving more intensity to monitoring them.

Keyword: society empowerment, and economic sector

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi. Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto sangat berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dengan merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Adapun Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto sendiri telah berupaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah. Program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat, beserta dampak program pemberdayaan tersebut terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan peranannya sebagai koordinator dan fasilitator, seharusnya senantiasa bekerja secara optimal dan profesional dengan memperhatikan tupoksi, target dan melaksanakan target tersebut secara konsisten, serta meningkatkan interaksi antara masyarakat yang memperoleh bantuan hibah meningkatkan intensitas dalam menjalankan monitoring kepada masyarakat yang telah mendapatkan bantuan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, dan bidang usaha ekonomi

Pendahuluan

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan

ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya.

Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang

kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun ketrampilan kepada masyarakat.

Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian.

Dalam hal ini, konsep dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Mojokerto khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Sehingga, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program apa sajakah yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi?
3. Bagaimana dampak program pemberdayaan bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto?

Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan

Menurut Siagian (1983, h.111), pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*National Building*).

Agus Suryono (2004, h.37), berpendapat setidaknya terdapat lima persyaratan pembangunan, antara lain: Kemampuan, Kebersamaan, Kekuasaan, Ketahanan, serta Saling ketergantungan.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999, h.72), peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

2. Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah serta Peran BPM dalam Pemerintah Daerah

Secara harfiah, otonomi diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak untuk mengatur sendiri (*the power or right of self-government*). Sedangkan pengertian daerah lebih merujuk kepada suatu wilayah (*area*). Sehingga, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri. (Nurcholis (2007, h.24)).

Sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang merupakan suatu kewajiban bukan hak.

Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah atau keputusan kepala daerah maupun peraturan kepala daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat tersebut bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas yang ada di dalamnya yang telah diberikan oleh Kepala daerah.

3. Pemberdayaan

Sumodiningrat (1999, h.133-134) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Menurut Craig dan Mayo dalam Nugroho (2007, h.28), partisipasi merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Strategi pemberdayaan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai isu pertama pembangunan saat ini.

Di samping pentingnya pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengganggu pengimplementasian pemberdayaan masyarakat dalam tataran praktis. Menurut Prasojo (2004, h.11), permasalahan tersebut menyangkut ketiadaan konsep yang jelas mengenai apa itu pemberdayaan masyarakat, batasan masyarakat yang sukses melaksanakan pemberdayaan, peran masing-masing pemerintah, masyarakat dan swasta, mekanisme pencapaiannya, dan lain sebagainya.

Selain itu, menurut Nuryoso (2008), usaha ekonomi produktif yang ada atau akan dibentuk pada masing-masing wilayah diidentifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dipilih untuk dikembangkan sebagai sasaran pembinaan. Pengembangan dilakukan melalui pembinaan manajemen usaha, bantuan modal bergulir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

4. Partisipasi Masyarakat

Conyers (1991, h.154-155), bahwa memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

5. Penelitian Terdahulu

Nugroho (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek–Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” menyatakan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemanfaatan teknologi tepat guna mesin pemecah kedelai adalah keadaan alam dan lingkungan yang sesuai, potensi daerah serta dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Sedangkan penelitian Susanti (2010) yang berjudul “Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Produktif (Studi di Kecamatan Kepanjen Sebagai Proyek Binaan BPM Kabupaten Kepanjen)” menyatakan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif Kecamatan Kepanjen adalah peranan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator dan fasilitator, dapat dilihat dengan adanya regulasi yang jelas beserta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama antar pelaku program mulai dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten serta antar Anggota Tim Koordinasi Kabupaten.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ini memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto.

Fokus penelitian ini adalah Program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi, meliputi: Persiapan pelaksanaan program, Proses pelaksanaan program. Dampak pemberdayaan di bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto, terutama pada: Produktivitas dan Pendapatan masyarakat.

Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Kepala Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat, serta Masyarakat yang memperoleh bantuan. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada di Kantor BPM Kota Mojokerto, serta situs yang bersumber dari internet, dokumen, dan karya tulis atau jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diangkat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara (*interview guide*), serta catatan lapangan (*field note*).

Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji reliabilitas (*reliability*) serta uji obyektivitas (*confirmability*).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Pembahasan

1. Program yang Telah Dilaksanakan Mulai Akhir Tahun 2011

Adapun program yang telah dilaksanakan oleh BPM mulai dari akhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 antara lain:

- a. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram
- b. Pelatihan Hasil olahan Bahan Dasar Jamur
- c. Pelatihan Ketrampilan Bahan Baku Kulit
- d. Bantuan Perorangan
 1. Bantuan Tenda
 2. Bantuan Mesin Jahit, Obras dan Neci
 3. Bantuan Gerobak
- e. Bantuan Lembaga

Program bantuan yang diberikan oleh pihak BPM telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat miskin yang ada untuk diberikan bantuan dan binaan terkait dengan program yang ada. Sesuai dengan pendapat dari Mubyarto (1997, h.35), bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi

Dalam setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum menginjak pada tahap pelaksanaan program.

Mekanisme persiapan yang dilakukan pihak BPM ini berawal dari data yang diajukan oleh Kelurahan, kemudian dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk menentukan masyarakat miskin yang akan diberikan bantuan hibah. Setelah ditentukan data penerima bantuan, kemudian dianjurkan bagi masyarakat untuk membuat proposal pengajuan bantuan, serta diberikan sosialisasi penerimaan dana bantuan guna menunjang kegiatan ekonomi mikro kecil.

Pelaksanaan program merupakan sebuah proses untuk mengoperasikan program-program yang telah disusun agar menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, proses pelaksanaan program dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan serta evaluasi program.

Dengan adanya sosialisasi kewirausahaan dan tata cara penerimaan bantuan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan agar dapat memotivasi mereka dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki serta dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup keluarga mereka. Sedangkan dalam proses pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pihak BPM masih belum dapat berjalan dengan baik, karena intensitas kunjungan yang dilakukan tidak teratur.

3. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Kemandirian Usaha Ekonomi Masyarakat

Secara keseluruhan program bantuan yang telah diberikan oleh pihak BPM diharapkan dapat merubah perekonomian masyarakat, dimana kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin yang telah dibangun semakin berkembang dengan baik. Seperti yang

diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan, dimana dengan adanya bantuan dari BPM maka pekerjaan mereka dapat dilakukan lebih ringan, di mana mereka dapat meminimalisir waktu mereka dalam bekerja.

Dalam hal ini, produktivitas usaha sangat dipengaruhi oleh peralatan penunjang yang digunakan serta SDM yang baik. Oleh sebab itu, demi menunjang berlangsungnya produktivitas yang baik diadakan sosialisasi atau pelatihan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program, sehingga SDM atau kelompok sasaran yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Dengan adanya program bantuan dari BPM ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga secara otomatis pendapatan mereka akan bertambah. Tetapi, program yang telah dilaksanakan oleh BPM itu tidak terlepas dari adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Bidang Usaha Ekonomi. Faktor pendukung yang paling dominan disini dapat dilihat dari partisipasi atau peran serta dari beberapa aparat pelaku usaha atau masyarakat ekonomi lemah yang bersangkutan.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program yang telah diberikan disini juga berasal dari pihak masyarakat sendiri yang masih berpikiran sempit, serta kondisi fisik yang terkadang mengalami penurunan sewaktu-waktu dan daya beli konsumen yang tidak stabil, serta faktor

lingkungan sekitar seperti yang dirasakan oleh petani jamur yang mengalami gagal panen akibat suhu udara yang tidak menentu.

Kesimpulan

1. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga.
2. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahap pelaksanaan diadakan sosialisasi kewirausahaan terkait dengan program yang akan diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah atau mikro kecil.
3. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. (1991) **Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar**. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Agustino Adi. (2008) **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Mesin Pemecah Kedelai (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)"**. Malang, FIA, UB.
- Nugroho, Trilaksono. (2007) **Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah**. Malang, FIA. Universitas Brawijaya.
- Nurcholis, Hanif. (2007) **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Jakarta, Grasindo.
- Nuryoso, Agus. (2008) **Fisip Undip Rintis Desa Mandiri Melalui UEP**. [Internet] Available from: <<http://www.undip.ac.id/>> [Accessed: 8 Januari 2013]
- Prasojo, Eko. (2004) **People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik**. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik vol.IV no.2. Maret-Agustus:10-24.
- Sondang, P. siagian. (1983) **Administrasi Pembangunan**. Jakarta, Gunung Agung.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999) **Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengamanan Sosial**. Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Suryono, Agus. (2004) **Pengantar Teori Pembangunan**. Malang, Universitas Negeri Malang.

Susanti, Linanda Krisni. (2010) **“Peranan badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan di Bidang Usaha Ekonomi Produktif (Studi di Kecamatan Kepanjen Sebagai Proyek Binaan BPM Kabupaten Kepanjen)”**. Malang, FIA, UB.

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 Tentang **“Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.”**